

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI  
DESA MARJANJI ACEH KECAMATAN AEK  
SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AJIJAH SIMANJUNTAK**

**NPM : 14.852.0031**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI  
DESA MARJANJI ACEH KECAMATAN AEK  
SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Akhir Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**



**Oleh :**

**AJIJAH SIMANJUNTAK**

**NPM : 14.852.0031**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN  
DI DESA MARJANJI ACEH KECAMATAN AEK  
SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN.**

**NAMA : AJIJAH SIMANJUNTAK**

**NPM : 148520031**

**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing**

  
**Dra. HJ. Rosmala Dewi, M.Pd**

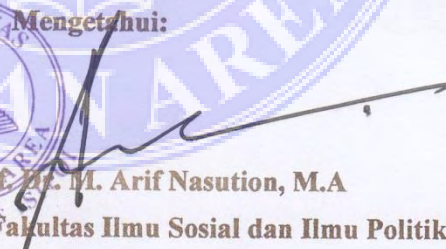
**Pembimbing I**

  
**Drs. Irwan Nasution, M.AP**

**Pembimbing II**

**Mengetahui:**



  
**Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Tanggal Lulus : 28 Mei 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dan susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

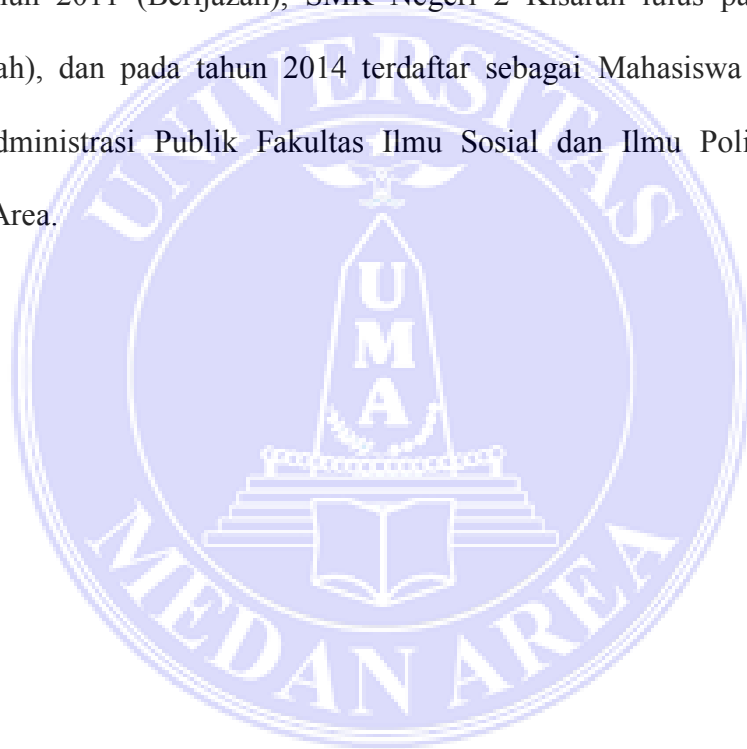
Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam penulisan skripsi.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ajjah Simanjuntak lahir di Desa Marjanji Aceh pada tanggal 15 Agustus 1995 dari pasangan suami istri Bapak Jamaluddin dan Ibu Ropeah Panjaitan, penulis merupakan anak ke enam dari tuju bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 013833 Marjanji Aceh lulus pada tahun 2008 (Berijazah), SMP Negeri 1 Aek Songsongan lulus pada tahun 2011 (Berijazah), SMK Negeri 2 Kisaran lulus pada tahun 2014 (Berijazah), dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

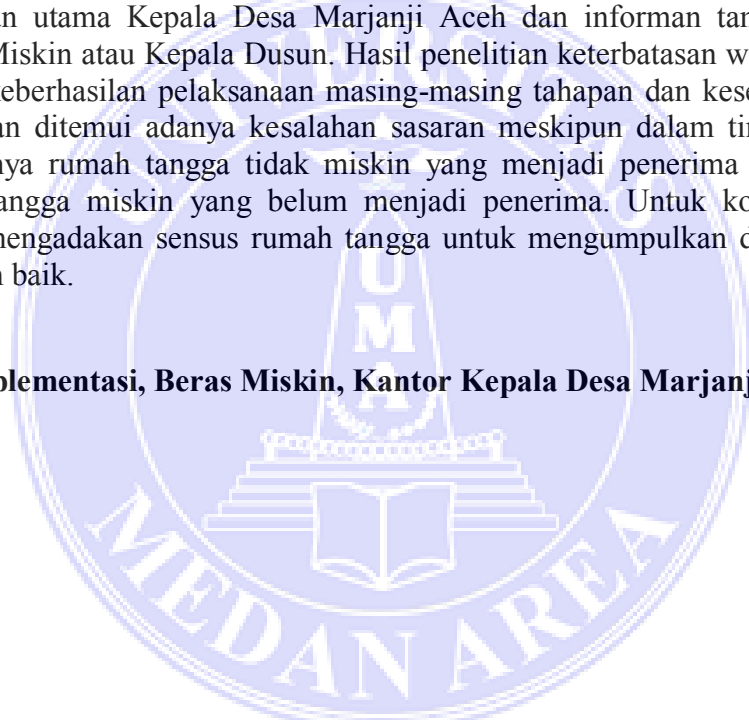


## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA MARJANJI ACEH KECAMATAN AEK SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

Program beras miskin hingga kini masih munculnya beberapa masalah yang diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran. Tujuan dari peneliti ingin melihat sudah bagaimana proses implementasi yang berjalan dalam pelaksanaannya program beras miskin. Peneliti ingin melihat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi program beras miskin di Desa Marjanji Aceh yang beralamat di jalan Besar Sigura-gura. Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Menjadi informan dalam penelitian ini adalah tiga orang informan yaitu Informan kunci penelitian ini adalah masyarakat, yang menjadi informan utama Kepala Desa Marjanji Aceh dan informan tambahan Pelaksana Program Beras Miskin atau Kepala Dusun. Hasil penelitian keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam penargetan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkatan yang lebih rendah dan adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima beras miskin dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima. Untuk konsep pengelolaan kedepan harus mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data rumah tangga miskin agar lebih baik.

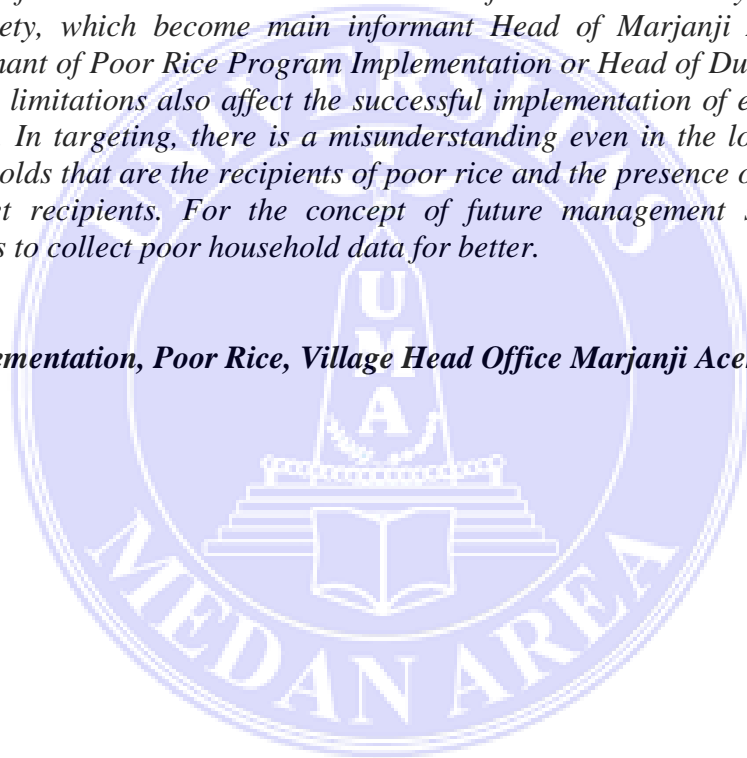
**Kata kunci :Implementasi, Beras Miskin, Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh**



ABSTRACT  
IMPLEMENTATION OF POOR RICE PROGRAM IN  
VILLAGE MARJANJI ACEH AEK DESCRIPTION  
SONGSONGAN DISTRICT ASALAN

*The poor rice program up to now is still the emergence of several problems that include the distribution has not been right on target. The purpose of the researchers wanted to see how the implementation process that runs in the implementation of poor rice program. Researchers want to see the barriers that occur in the process of implementing the poor rice program in the village of Marjanji Aceh which is located in Jalan Besar Sigura-gura. The data source used in doing this research is primary data and secondary data. Data collection techniques used by the author is to conduct interviews, observation, and study documentation. While the data analysis technique used is descriptive method with qualitative analysis. Being informant in this research is three informant that is Key informant of this research is society, which become main informant Head of Marjanji Aceh Village and additional informant of Poor Rice Program Implementation or Head of Dusun. The results of the study of time limitations also affect the successful implementation of each stage and the overall program. In targeting, there is a misunderstanding even in the lower level and the non-poor households that are the recipients of poor rice and the presence of poor households who are not yet recipients. For the concept of future management should conduct a household census to collect poor household data for better.*

**Keywords: Implementation, Poor Rice, Village Head Office Marjanji Aceh**



## KATA PENGANTAR

Segala pujian dan kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan atas rahmat serta kasihnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sahalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar serjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul: **"Implementasi Program Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan"**.

Peneliti menyadari bahwa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan terwujudnya ini, adapun tujuan ini ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti "Ayah dan Ibu" yang telah membesarkan, manasehati, membimbing, dan mendidik peneliti sejak kecil hingga kuliah tanpa balasan. Serta yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan baik materi untuk pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga kuliah dan mendapatkan gelar Serjana Universitas Medan Area;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;
4. Ibu Dra Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku pembimbing 1 peneliti sekaligus Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas



Medan Area dan yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Drs. Irwan Nasution, M.AP selaku pembimbing II peneliti yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, Msi selaku sekretaris panitia yang telah memberikan tanggapan terhadap skripsi penelitian;
7. Para Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik, koreksi, masukan dan saran demi untuk kesempurnaan skripsi ini;
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi kuliah kepada penulis;
9. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
10. Bapak R.Sofiyon Panjaitan selaku Kepala Desa Marjanji Aceh yang telah bersedia memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
11. Para Pegawai dan staf Desa Marjanji Aceh yang sebagai responden dan narasumber yang berkenan untuk menyediakan data-data pegawai yang dapat mendukung penulis dalam melakukan peneliti;
12. Abang, kakak, adik dan saudara yang selalu mendukung, mendoakan, dan bersama dengan peneliti saat suka dan duka;
13. Hamsyah sitorus yang selalu ada bersama penulis dalam suka dan duka yang selalu memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi;
14. Monica Feby Yanti Aritonang sahabat yang selalu memberi dukungan dan membantu penyusunan skripsi;

15. Sahabat seperjuangan Best Nur yaitu Qilby, Ela Dwi Tika, Fitra Sarumaha yang selalu ada dan merasakan manis pahitnya perjuangan selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan;
16. Terima kasih kepada Teman SD ku Rama Sri Wahyuni, Suci Arien Mutiara Sianipar, Ikdina Pratiwi Simanjuntak yang selalu setia menemani dalam melaksanakan penelitian;
17. Rekan-rekan IMABATO UMA yang telah memberikan pengalaman yang paling berharga dalam berorganisasi dan terimakasih telah menjadi keluarga kedua sekaligus rekan kerja yang hebat di dalam organisasi maupun diluar organisasi;
18. Seluruh sahabat, kerabat, teman-teman sejawat dan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, khususnya teman-teman Administrasi Negara stambuk 2014 yang turut serta dalam proses pembuatan dan doa sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan;
19. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang juga telah ikut ambil bagian dalam memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang selalu peneliti nantikan dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terimakasih.

Medan,  
Hormat Peneliti

AJIJAH SIMANJUNTAK  
14 852 0031

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kebijakan Publik.....	5
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	5
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	6
2.1.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	7
2.2 Pengertian Implementasi .....	8
2.2.1 Implementasi.....	9
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	11
2.4 Beras Untuk Keluarga Miskin .....	15
2.4.1 Pengertian Beras Miskin .....	15
2.4.2 Tujuan Dan Sasaran Program Beras Miskin .....	21
2.4.3 Penentuan Pangan .....	21
2.4.4 Prinsip pengelolaan dan pengorganisasian .....	22
2.4.5 Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin Di Desa/Kelurahan .....	23
2.4.6 Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Beras Miskin ....	24
2.4.7 Pengertian Kemiskinan .....	25
2.9 Peraturan Undang-Undang Pelaksana Program Beras Miskin .....	26
2.10 Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30
3.1.2 Sifat Penelitian .....	31
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	31

3.1.4 Waktu Penelitian.....	31
3.2 Informan Penelitian.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Keadaan Geografis Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh .....	35
4.2 Demografis Penduduk Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh.....	36
4.3 Visi Dan Misi Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh .....	38
4.4 Tugas Dan Fungsi Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh .....	39
4.5 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Marjanji Aceh .....	44
4.6 Masyarakat Yang Menerima Beras Miskin .....	45
4.7 Sarana Dan Prasarana Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh.....	45
4.8 Pembahasan .....	47
4.8.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan.....	47
4.8.2 Implementasi Program Beras Di Desa Marjanji Aceh.....	52
4.8.2.1 Ketepatan Sasaran.....	52
4.8.2.2 Ketepatan Jumlah.....	55
4.8.2.3 Ketepatan Harga.....	55
4.8.2.4 Ketepatan Waktu.....	56
4.8.2.5 Ketepatan Administrasi.....	57
4.8.2.6 Ketepatan Kualitas .....	58

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jadwal Dan Waktu Penelitian .....	31
Tabel 2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia .....	36
Tabel 4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Pokok .....	37
Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Agama .....	37
Tabel 6. Penduduk Berdasarkan Suku .....	38
Tabel 7. Nama-Nama Petugas Desa Marjanji Aceh .....	40
Tabel 8. Jumlah yang Menerima Dan Tidak Menerima Beras Miskin .....	45
Tabel 9. Prasarana Air Bersih .....	45
Tabel 10. Prasarana Kesehatan .....	46
Tabel 11. Prasarana Desa Marjanji Aceh .....	46

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemulihan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah hingga saat ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut. Pemulihan ini dilakukan di semua sektor melalui masing-masing kebijakan untuk tiap-tiap sektor dengan melihat masalah-masalah yang menjadi isu saat ini. Salah satu isu permasalahan di Indonesia hingga saat ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat dan sumber daya. Kemiskinan merupakan gambar kehidupan di berbagai negara berkembang, mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani).

Kemiskinan merupakan masalah sosial utama yang sangat sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia, senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejala tersebut semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensi yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kemiskinan dan kerawanan pangan menjadi perhatian nasional yang harus ditanggulangi pemerintah dan masyarakat yang penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai lapisan. Salah satu wujud nyata pemerintah dalam

menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat kurang mampu (miskin) melalui pendistribusian beras bersubsidi untuk keluarga miskin yang berfokus dalam rangka perlindungan sosial khususnya pada masyarakat miskin.

Program beras miskin dicapai melalui koordinasi antara instansi atau lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Terhadap beberapa unsur dalam beras miskin, antara lain adalah Pedoman Pelaksanaan Program Beras Miskin, Tim Koordinasi Program Beras Miskin Provinsi, Tim Beras Miskin, Divisi Regional, Satuan kerja (Satker) Beras Miskin, Tim Koordinasi Beras Miskin Kecamatan, Pelaksan Distribusi, Titik Distribusi, Rumah Tangga Miskin (RTM), Musyawarah Desa/Kelurahan, Beras Standar Kualitas Bulog, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).

Keputusan Menteri Sosial Dalam Negeri Nomor 339/HUK/2016 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat Beras Miskin tahun 2017 dalam penyaluran beras miskin bersubsidi bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Mengingat program beras miskin merupakan tugas pemerintah dalam pelayanan publik tentunya harus mengacu kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penentuan kriteria penerima manfaat beras miskin seringkali menjadi persoalan yang rumit, dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miski. Dimana masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana program beras



miskin ini dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat atau pun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Program beras miskin adalah sebuah program dari pemerintah yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin maksimal 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600,-/kg. Harga tersebut adalah harga titik distribusi, Biaya dari titik distribusi ketempat masing-masing di tanggung oleh masing-masing penerima.

Dari Uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DI DESA MARJANJI ACEH KECAMATAN AEK SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kedudukan masalah yang akan diteliti sangat sentral dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Program Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan?”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Implementasi Program Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis ini salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat desa terutama di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan untuk dapat memberikan beras miskin kepada warga secara maksimal dan tepat sasaran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/wali kota. Secara teknologi pengertian kebijakan publik (*public policy*), itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Kebijakan diberi arti bermacam-macam oleh beberapa ahli. Menurut Friedrich (2007: 20) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pun pemerintah dalam lingkungan tertentu hubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang

mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan berbuat atau tidak berbuat.

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003:2) kebijakan publik adalah pengembangan dari kibijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah ini dilandaskan pada perundang-undang dan bersifat memaksa.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

### **2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2008: 32) Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan

kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.
- b. Tahap formulasi kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan-kebijakan tersebut.
- d. Tahap implementasi kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan, jika program tersebut tidak di implementasikan.
- e. Tahap evaluasi kebijakan  
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

### **2.1.3 Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Sebagai suatu sistem yang terdiri dari suatu kebijakan dapat dilihat dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan terdapat tahap-tahap sebagai berikut: Identifikasi masalah dan tujuan formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Friedrich (2007: 27) dilihat dari sisi struktur kebijakan terdapat lima unsur yaitu :

1. Tujuan kebijakan  
Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai, dan tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan itu.
2. Masalah  
Masalah atau sering disebut dengan isu sangatlah penting bagi suatu kebijakan. Kesalahan dalam menentukan suatu masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan.
3. Permintaan

Permintaan atau yang disebut tuntutan atau tantangan sebuah kritik atau seperti halnya partisipasi pada umumnya. Tuntutan dapat bersifat moderen atau radikal tergantung pada urgensi suatu tuntutan.

#### 4. Dampak atau hasil

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif dan dampak yang timbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif. Berapa besar dampak yang terjadi susah diperhitungkan hal ini disebabkan antara lain :

- a. Tidak tersedianya informasi yang cukup.
  - b. Dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu kebijakan susah untuk dipisahkan dari pengaruh kebijakan lainnya.
  - c. Proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dibidang sosial sudah diamati.
- #### 5. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, pengembangan kemampuan, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kebijakan publik dan unsur-unsur kebijakan publik harus dilakukan dalam membuat suatu kebijakan untuk mendapatkan kebijakan publik sesuai dengan isu masalah publik yang ada, sedangkan unsur-unsur kebijakan publik merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan publik.

## 2.2 Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (1997: 45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### **2.2.1 Implementasi**

Menurut Mazmanian (2003:84) mengatakan bahwa implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk administrasi maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan Grindle (2007: 23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada tindakan program dari individu dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses akan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembentuknya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi secara kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembentuk kebijakan.



Menurut Winarno (2008: 143) Mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

### **2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan bijak dalam penelitian ini. Model Yang Dikembangkan Oleh George C. Edwards III.

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

## 1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tanpa tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalah pahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atas terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan. Dengan demikian instruksi implementasi tidak tertransmisikan dan terdistorsi dalam proses transmisi. Inkonsisten dapat mengakibatkan

hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi.

## 2. Faktor Sumber Daya (*Resourches*)

Menurut Edwards (1980: 10) Menjelaskan bahwa Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa Undang- Undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hubungan ini, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle, Mazmanian, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan didasarkan pada sumber daya yang dimiliki dengan segala perilakunya. Sumber daya dalam suatu organisasi dan orang yang terlibat didalamnya, mutu dan jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan budaya organisasi. Selain itu, apabila suatu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi juga meliputi kerjasama dan koordinasi.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

### 3. Faktor Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwards (1980: 11) menegaskan sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

#### 4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edwards (1980: 11) Menjelaskan: Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menanganin tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

### **2.4 Beras Untuk Keluarga Miskin**

#### **2.4.1 Pengertian Beras Miskin**

Program beras miskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan

perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg setiap rumah tangga miskin setiap bulan dengan masing-masing seharga Rp 1.600, per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog (Badan Urusan Logistik). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program beras miskin adalah salah satu program penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Program beras miskin perlu direncanakan secara bersama antara Pemda selaku pelaksana program dan masyarakat selaku penerima manfaat serta melalui program ini dapat dikembangkan prinsip-prinsip pemberdayaan di daerah. Hal ini dalam rangka operasional pelaksanaan program beras miskin di lapangan, maka memerlukan dukungan berbagai institusi dalam kesatuan komitmen sehingga dapat terbagun keberhasilan program.

Tujuan program beras miskin adalah Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan, dalam bentuk beras. beras miskin adalah program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Efektifitas beras miskin sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan ketepatan jumlah beras yang diterima. Sasaran program beras miskin tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. Program beras miskin dikenal beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk petunjuk teknis yaitu:

1. Tim koordinasi program beras miskin tingkat Provinsi adalah tim koordinasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan terdiri dari unsur pemerintah daerah Provinsi (Biro Sarana Perekonomian, Biro Bina Produksi, badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD), badan pusat statistik (BPS), badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN), Perum Bulog, kepolisian, kejaksaan serta kepentingan yang terkait.
2. Tim koordinasi Provinsi adalah satuan kerja Perum Bulog yang dibentuk Kadivreg yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi dalam pelaksanaan program beras miskin.
3. Satuan kerja program beras miskin adalah satuan kerja Perum Bulog yang dibentuk pembagian daerah yang bertugas dan tanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
4. Tim koordinasi beras miskin Kecamatan adalah tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai ketua yang beranggotakan unsur Kecamatan, Polsek, Pengelola Program KB Kecamatan dan Koordinator Sensus Kecamatan (KSK) yang bertugas mengkoordinir pelaksana Program Beras Miskin di Kecamatan.
5. Pelaksana distribusi adalah kelompok kerja (Pokja) titik distribusi yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan, terdiri dari Aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat, dan unsur –unsur masyarakat yang bertugas dan tanggung jawab mendistribusikan Beras Miskin kepada penerima manfaat beras miskin.
6. Rumah tangga miskin (RTM) adalah penerima manfaat program beras miskin di Desa/Kelurahan sesuai hasil pendataan sosial ekonomi dengan kategori sangat miskin, miskin, dan sebagian hampir miskin.

7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan rumah tangga miskin yang berhak menerima beras miskin.
8. Beras standar kualitas bulog adalah beras kualitas medium, kondisi baik dan tidak berhama.
9. Unit pengaduan masyarakat (UPM) adalah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur di Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota yang berfungsi menerima dan menindak lanjuti pengaduan Masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung termasuk media cetak dan elektronik.

Prinsip pengelolaan beras miskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan beras miskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan beras miskin. Keberpihakan rumah tangga sasaran, yang maknanya mendorong rumah tangga sasaran untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan beras miskin baik di Kelurahan dan Kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Beras miskin 2017 Mekanisme Pelaksanaan Beras Miskin sebagai berikut:

- a. Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan inpres perbesaran yang berlaku.

- b. Rencana Penyaluran

Tim koordinasi beras miskin provinsi dan tim koordinasi beras miskin kabupaten/kota menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah



dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi.

c. Pola Penyaluran Beras Miskin

Penyaluran beras miskin dapat dilakukan secara regular melalui kelompok kerja atau dengan cara lain melalui desa, kelompok masyarakat.

d. Pendistribusian Beras Miskin

1. Bupati/ walikota mengajukan Surat Pemerintah Alokasi (SPA) kepada kepala sub divisi Regional Perum Bulog berdasarkan alokasi pagan beras miskin dan rumah tangga sasaran penerima manfaat di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Surat pemerintah alokasi (SPA) yang tidak dapat dilayani sebagi atau seluruhnya dalam janka waktu 3 (tiga) bulan, maka pagan dapat direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani.
3. Berdasarkan SPA, Sub Divre menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) beras untuk masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan kepada pelaksana beras miskin. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada priode sebelumnya maka penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) DO periode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
4. Berdasarkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), pelaksana beras miskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras miskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan, sesuai dengan standar kualitas Bulog. Apabila tidak memenuhi standar kualitas Bulog, maka beras dikembalikan kepada pelaksana beras miskin untuk ditukar atau diganti.
5. Serah terima beras miskin dari pelaksana beras miskin kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.

6. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin.
7. Mekanisme distribusi secara rinci diatur dalam Pedoman Teknis Raskin Kabupaten/Kota dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

Kriteria Untuk Menentukan Keluarga/Rumah Tangga Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPJ) yaitu sebagai berikut:

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/klinik.
- l. Sumber penghasilan kepada keluarga adalah petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangun, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga, tidak bersekolah dan tidak tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

#### **2.4.2 Tujuan Dan Sasaran Program Beras Miskin**

- a. Tujuan

Tujuan program beras miskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program beras miskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

b. Sasaran

Sasaran dari program beras miskin ini adalah rumah tangga yang dapat menerima beras miskin, atau juga disebut rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) program beras miskin, yaitu rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat RTS-PM program beras miskin.

#### **2.4.3 Penentuan Pangan**

Pangan beras miskin adalah lokasi jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat beras miskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM beras miskin untuk tingkat nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu. Pangan beras miskin nasional dialokasikan ke Provinsi di seluruh Indonesia oleh Tim Koordinasi beras miskin pusat berdasarkan data RTS dari badan pusat statistik (BPS). Pangan beras miskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Pangan beras miskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pangan beras miskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Pangan beras miskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat ditetapkan oleh

Bupati/Walikota. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota segera mengalokasikan anggaran Beras Miskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintah yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Beras Miskin secara berjenjang.

#### **2.4.4 Prinsip Pengelolaan Dan Pengorganisasian**

##### **a. Prinsip pengelolaan**

Prinsip pengelolaan beras miskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan beras miskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan beras miskin. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan beras miskin baik di Desa dan Kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

##### **b. Pengorganisasian**

Dalam rangka pelaksanaan program beras miskin tahun 2017 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program beras miskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabnya, dibentuk Tim Koordinasi beras miskin di tingkat Pusat sampai Kecamatan dan pelaksana distribusi beras miskin di tingkat Desa/Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program beras miskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di

Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah kepala Desa/Lurah.

#### **2.4.5 Pelaksana Distribusi Beras Miskin di Desa/Kelurahan**

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi beras miskin, penyelesaian pembayaran dan administrasi distribusi beras miskin di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi beras miskin di wilayahnya, kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif pelaksana distribusi beras miskin yaitu:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi beras miskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi beras miskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerima/penolakan beras miskin dari Prum BULOG.

Untuk Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak beras miskin diatur dalam petunjuk teknis.

- b. Pendistribusian dan penyerahan beras miskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di titik bagi(TB).

- c. Penerimaan beras miskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Prum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran beras miskin yaitu penanda tanganan berita acara serah terima (BAST) beras.
- e. Membantu Daftar Realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Beras Miskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Beras Miskin Kecamatan.

#### **2.4.6 Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Beras Miskin**

- a. Rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan beras miskin adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam pendataan program perlindungan sosial (PPLS) badan pusat statistik (BPS) sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM ditingkat Desa/Kelurahan, maka perlu dilakukan Mudes/Muskel untuk mendapatkan kebijakan lokal:
  - 1) Melakukan verifikasi nama rumah tangga strategi (RTS) hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal

(tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.

- 2) RTM yang belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS diatas, yang dinilai layak sesuai kriteria RTS, BPS dapat diberikan beras miskin.

#### **2.4.7 Pengertian Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar dan permasalahan kemiskinan yang kompleks dan luas menuntut penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam mengatasi masalah kemiskinan harus bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai maka lapangan kerja yang tersedia tidak akan cukup atau bisa jadi tersedia lapangan kerja yang luas namun tidak sanggup untuk menyediakan tatanan upah yang memadai sehingga tidak sanggup mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah kemiskinan banyak dikaji oleh para ahli dari berbagai aspek dan dari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bermacam-macam ukuran dan konsep.

Pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang timbul karena pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup seperti sandang, pangan.

- b. Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan Kultural adalah suatu kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

## **2.5 Peraturan Undang-Undang Pelaksanaan Beras Miskin**

1. Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Tentang Pangan.

Bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup.

2. Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2016, tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah perlu menugaskan perusahaan umum Perum BULOG.

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 339/HUK/2016 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat Beras Miskin tahun 2017.



## 2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai implementasi program beras miskin di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan, dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian ini mengambil teori dari model implementasi kebijakan dari Model George C. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kebijakan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi adalah:

- a. Faktor Komunikasi (*Communication*)
- b. Faktor Sumber Daya (*Resourches*)
- c. Faktor Sikap Pelaksana (*Dispotition*)
- d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Dari teori George C. Edwards III tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi penyaluran Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan. Jika dilihat dari prosesnya apakah penyaluran Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh sudah sesuai dengan yang ditentukan, serta apakah tujuan kebijakan tercapai. Keberhasilan Program Beras Miskin di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dapat di ukur dengan dua faktor:

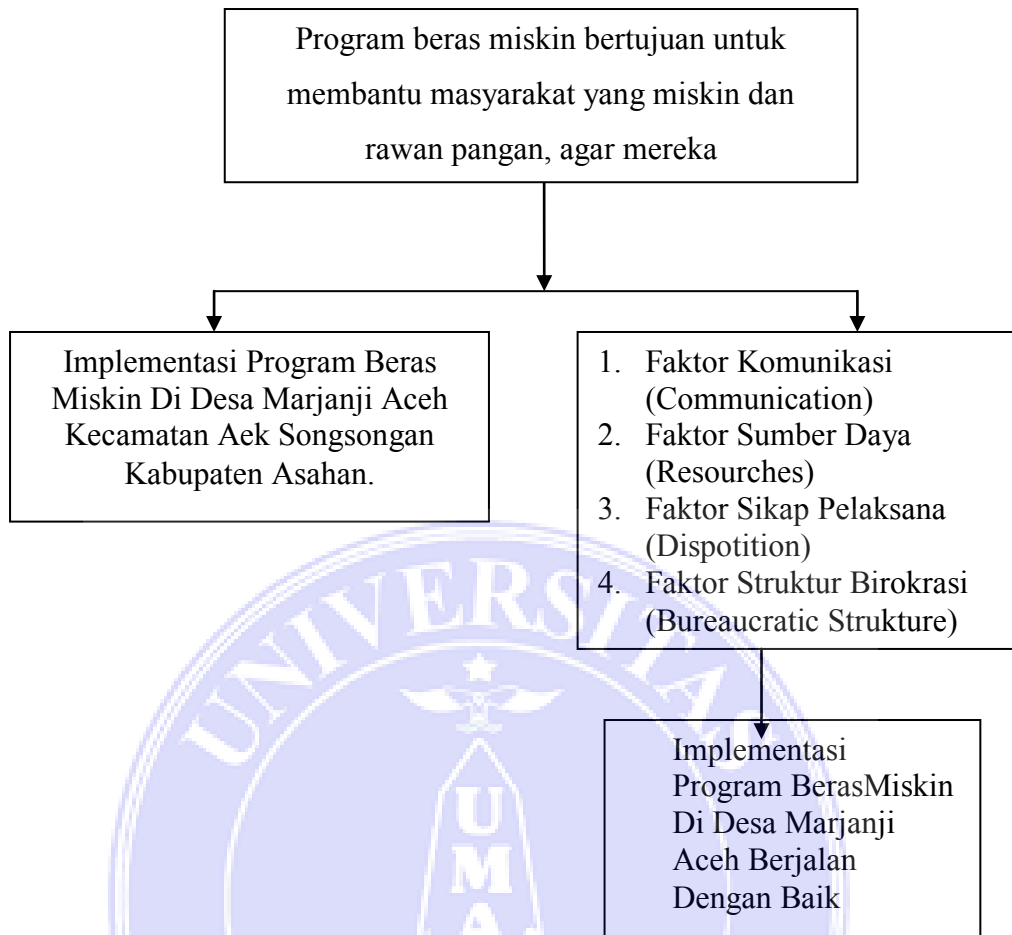
1. Efek pada masyarakat secara individu dan kelompok dengan adanya Program Beras Miskin apakah masyarakat merasakan ada manfaat positif yang dapat mereka rasakan, yaitu dapat membeli beras dengan harga murah, dan efek yang lain adalah program Beras Miskin dari pemerintah untuk

masyarakat miskin tersebut sering diselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan pribadi.

2. Tingkat perubahan yang terjadi, yaitu dengan adanya program Beras Miskin, masyarakat miskin tersebut sudah bisa sejahtera, atau sama saja seperti belum digulirkannya program Beras Miskin kepada mereka, bahkan program Beras Miskin ini tidak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, Inilah yang ingin peneliti ketahui dan penulis akan melakukan riset di lapangan.

Dari analisis di atas maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:





George C. Edwards III (1980:9) dalam Arifin Tahir (2015)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi data.

Menurut Sugiyono (2015: 20) menyatakan sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa penelitian kualitatif itu:

- a) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c) Penelitian kualitatif lebih menekankan ada proses dari pada produk atau *Outcome*.
- d) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.

##### 2.3.1 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat Deskriptif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan koneksi dan data serta gejala-gejala yang ada dan

penjabaran-penjabaran variabel dalam penelitian dengan tidak mengukur hubungan antara variabel.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan Di Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

**Tabel 1. Jadwal dan Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Oktober			November				Desember				Januari				Februari			Maret				April			Mei			
		2017			2017				2017				2018				2018			2018				2018			2018			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
2	Seminar Proposal												■																	
3	Perbaikan Proposal																													
4	Pengambilan Data/Peneliti																■	■	■	■	■	■	■							
5	Penyusunan Skripsi																			■	■	■	■	■	■	■				
6	Seminar Hasil																										■	■	■	■
7	Perbaikan Skripsi																										■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																													■

### 3.2 Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah aparatur dan tokoh masyarakat yang mengenai langsung atau terkait dalam penelitian ini. Teknik *purposive* samping digunakan dalam penentuan jumlah informan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci yaitu Masyarakat yang menerima Beras Miskin Di Desa Marjanji Aceh dan masyarakat yang tidak menerima beras miskin.
2. Informan Utama yaitu kepala Desa Marjanji Aceh Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.
3. Informan Tambahan yaitu Pelaksana Program Beras Miskin atau Kadus.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2008: 157) Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis sumbernya yaitu:

#### **1. Teknik pengumpulan data Primer**

Pengumpulan data Primer tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- a. Metode wawancara, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Metode observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus peneliti.

#### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data dan melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2012: 244) Menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membantu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang dianggap menjadi pusat penelitian dilapangan.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

#### d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi



Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatandengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdin, Said Zainal, (2002), *kebijakan publik*. Jakarta

Agustino Leo, (2006:139), *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Friedrich,( 2007). *Kebijakan Publik. Mandar Maju* : Bandung.

Grindle, (1980). *Implementation Politics And Policy In The Third World*. Princeton University Press: New Jersey.

Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabtier, (eds). (1981). *Effective Policy Implementation*, Lexington: Mass. D.C.Health.

Mulyadi Deddy, (2006), *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Nugroho Riant, Dwidjowijoto, (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.

Tahir Arifin, (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta,cv.

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Administrasi, Metode R&D*, Bandung: Alfabeta.

Winarno Budi, (2008). *Kebijakan publik teori dan proses*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta 55292.

Wahab, Solichin Abdul, (1997). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Negara*. Malang.

## **Undang-Undang**

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2012, tentang pangan  
Peraturan Presiden RI No 48 2016, tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.
2. Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2016, tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.  
Undang-undang 18 2016 tentang Anggaran pendapatan Belanja Negara Tahun 2017.

## **Jurnal**

- Nuranisa, Henni.2016. Implementasi Program Raskin (Beras Miskin Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Medan Sunggal). Jurnal Administrasi Publik diakses pada tanggal 07 November 2017
- Sinaga, Manatar.2016. Implementasi Program Raskin (Beras Miskin Pada Desa Lingga Raja 1, Kecamatan Pegagan Hilir). Jurnal Administrasi Publik diakses pada tanggal 19 November 2017

## **Alamat Web-site**

[Http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38054](http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38054) (diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, waktu 17.29 WIB)

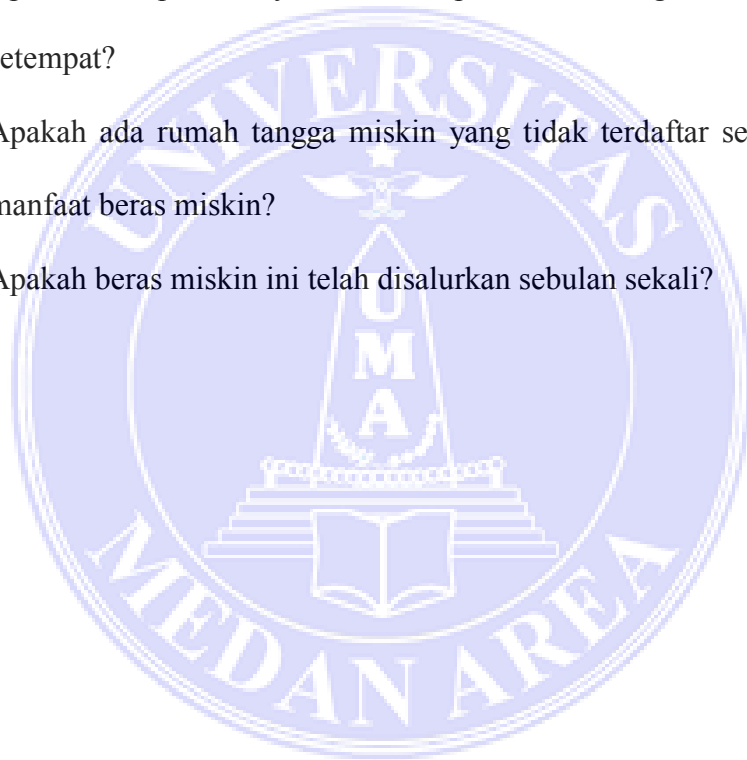
[Http://respository.usu.ac.id./handle/123456789/18187](http://respository.usu.ac.id./handle/123456789/18187) (diakses pada tanggal 21 november 2017, waktu 12.50 WIB)

[Http://respository.usu.ac.id./handle/123456789/38054](http://respository.usu.ac.id./handle/123456789/38054) (diakses pada tanggal 23 november 2017, waktu, 19.00 WIB)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

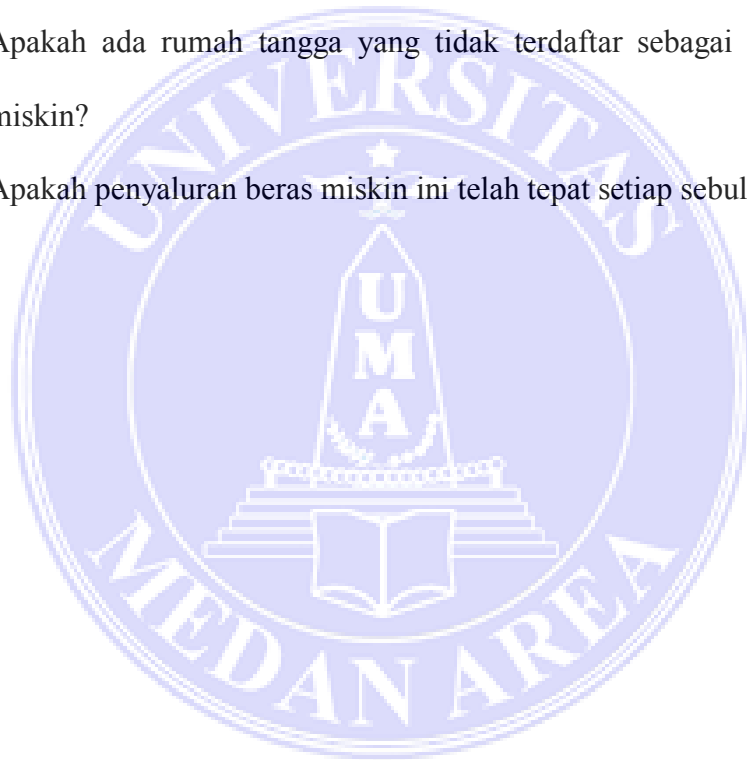
### **DESA MARJANJI ACEH**

1. Apakah semua masyarakat sudah memahami prosedur yang sudah ditetapkan?
2. Berapa jumlah beras serta harga beras per kg yang didistribusikan kepada masyarakat?
3. Apakah setiap tahunnya dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat setempat?
4. Apakah ada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat beras miskin?
5. Apakah beras miskin ini telah disalurkan sebulan sekali?



## **PEGAWAI/STAF KANTOR KEPALA DESA MARJANJI ACEH**

1. Apakah sudah pernah menerima keluhan dari masyarakat yang menerima beras miskin?
2. Berapa jumlah harga beras miskin per kg yang di distribusikan kepada masyarakat?
3. Bagaimana cara pendistribusian beras miskin,apakah sudah berjalan dengan baik?
4. Apakah ada rumah tangga yang tidak terdaftar sebagai penerima beras miskin?
5. Apakah penyaluran beras miskin ini telah tepat setiap sebulan sekali?



## **MASYARAKAT DESA MARJANJI ACEH**

1. Apakah ibu menerima beras miskin sebesar 15 kg/ bulan tanpa di potong?
2. Menurut ibu apakah kualitas beras miskin ini layak untuk dikonsumsi?
3. Apakah aparat desa marjanji aceh telah mampu melaksanakan program beras miskin ini dengan sebaik baiknya?
4. Apakah ibu pernah tidak menebus atau membeli beras miskin ini?
5. Bagaimana pelayanan yang di beri aparat desa marjanji aceh kepada ibu, apakah sudah baik?
6. Apakah program beras miskin ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan ibu?
7. Apakah beras murah yang diberikan sebesar 15 kg ini mencukupi kebutuhan selama 1 bulan?
8. Apakah dengan adanya program beras miskin ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran ibu?

## LAMPIRAN 2

### DATA-DATA INFORMAN

1. Nama : R. Sofyan Panjaitan  
Jabatan : Kepala Desa  
Waktu Penelitian : 01 Februari 2018, Pukul : 10.45 WIB  
Tempat Wawancara : Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh
2. Nama : Dewi Tambunan  
Jabatan : Kaur. Pemerintahan  
Waktu Penelitian : 01 Februari 2018, Pukul : 13.30 WIB  
Tempat Wawancara : Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh
3. Nama : Sugiono  
Jabatan : Sekretaris  
Waktu Penelitian : 05 Februari 2018, Pukul : 09.30 WIB  
Tempat Wawancara : Kantor Kepala Desa Marjanji Aceh
4. Nama : Viktor Panjaitan  
Jabatan : Kepala Dusun 1  
Waktu Penelitian : 07 Februari 2018, Pukul : 13.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di Rumah Kepala Dusu 1
5. Nama : Wariman  
Jabatan : Kepala Dusun II  
Waktu Penelitian : 07 Februari 2018, Pukul : 14.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di Rumah Kepala Dusun II

6. Nama : Sahdon Panjaitan  
Jabatan : Kepala Dusun III  
Waktu Penelitian : 08 Februari 2018, Pukul : 12.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di Rumah Kepala Dusun III
7. Nama : Suprianto  
Jabatan : Kepala Dusun V  
Waktu Penelitian : 09 Februari 2018, Pukul : 13.25 WIB  
Tempat Wawancara : Di Rumah Kepala Dusun V
8. Nama : Suwandi  
Jabatan : Kepala Dusun VI  
Waktu Penelitian : 10 Februari 2018, Pukul : 11.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di Rumah Kepala Dusun VI
9. Nama : Ana Sirait  
Jabatan : Masyarakat yang menerima beras miskin  
Waktu Penelitian : 12 Februari 2018, Pukul : 13.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di rumah masyarakat dusun 1
10. Nama : Nurbaya Tambunan  
Jabatan : Masyarakat yang tidak menerima beras miskin  
Waktu Penelitian : 12 Februari 2018, Pukul : 14.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di rumah masyarakat dusun II
11. Nama : Santi Siagian  
Jabatan : Masyarakat yang menerima beras miskin  
Waktu Penelitian : 13 Februari 2018, Pukul : 13.30 WIB  
Tempat Wawancara : Di rumah masyarakat dusun IV



## DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

Foto Bersama Kepala Desa Marjanji Aceh Bapak R.Sofian Panjaitan



Foto Bersama Pegawai Desa Marjanji Aceh



Foto Bersama Bapak Kepala Desa Dan Staf Pegawai Desa Marjanji Aceh



Foto Bersama Bapak Viktor Panjaitan Kepala Dusun I Km 5



Foto Bersama Bapak Wariman Kepala Dusun II Km 5



Foto Bersama Bapak Sahdon Panjaitan Kepala Dusun III Kamper



Foto Bersama Bapak Ponirin Kepala Dusun IV Km 4



Foto Bersama Bapak Suprianto Kepala Dusun V Perhotangan



Foto Bersama Bapak Suwandi Kepala Dusun VI



Foto Bersama Ibu Ana Sirait Yang Menerima Beras Miskin, Dusun I Km 5



Foto Bersama Ibu Ana Sirait Yang Menerima Beras Miskin, Dusun I Km 5



Foto Bersama Ibu Santi Siagian Yang Menerima Beras Miskin, Dusun III



Foto Bersama Ibu Robaya Tambunan Yang Tidak Menerima Beras Miskin, Dusun IV



Foto Bersama Ibu Katik Simanjuntak Yang Tidak Menerima Beras Miskin, Dusun V



